

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro merupakan kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia. UMKM sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang ada (Rachmanti dkk, 2019).

Kota Palembang sebagian kecil warganya memiliki pekerjaan sebagai wirausaha. Salah satu usahanya adalah jenis kerajinan. Kerajinan yaitu menciptakan karya yang memiliki fungsi keindahan dan dapat menghasilkan nilai jual yang tinggi. Jenis kerajinan di Kota Palembang terdapat, kerajinan membatik, kerajinan tenun songket, kerajinan blongsong dan kerajinan jumputan. Kawasan daerah Palembang usaha jenis kerajinan kain jumputan, ini sudah dikembangkan dalam waktu yang lumayan lama dan berkembang sangat pesat karena banyak diminati oleh konsumen karena bisa dipakai untuk acara pernikahan, hajatan, wisuda, dan cinderamata.

Kain jumputan atau yang dikenal sebagai kain pelangi, dibuat dengan cara menjumput kain yang telah diisi biji-bijian atau motif yang telah dilukis sebelumnya pada bahan dasarnya. Jumputan punya warna dan motif khas tersendiri. Menjumput seperti menambahkan sentuhan warna pelangi yang

menandakan banyaknya perpaduan budaya di Kota Palembang yaitu, budaya Jawa, Melayu, Tionghoa (<http://palembang.tribunnews.com>).

Secara umum ciri-ciri UMKM adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang di pekerjakan terbatas. Tingginya potensi UMKM dalam perkembangan perekonomian tidak diimbangi dengan kualitas UMKM. Pencatatan dan pengelolaan keuangan yg merupakan salah satu keberhasilan UMKM permasalahan paling mendasar dalam UMKM adalah pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang belum memadai. Hal tersebut karena UMKM terkendala dalam berbagai faktor antara lain kurangnya pengetahuan tentang pencatatan akuntansi.

Pelaporan UMKM pada umumnya mencatat jumlah barang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, jumlah piutang dan hutang, tanpa menggunakan standar akuntansi keuangan yang ada, hal tersebut belum mencerminkan informasi keuangan yang sebenarnya. Informasi akuntansi yang dihasilkan berguna dalam pengambilan keputusan sehingga dasar pertimbangan antara lain : pembelian bahan baku dan alat-alat produksi, penentuan harga, pengajuan permohonan, pembiayaan kepada bank, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta menambahkan aset usaha. Informasi keuangan yang sistematis pada laporan keuangan dapat memudahkan pelaku UMKM mengevaluasi kondisi usaha sehingga dapat menjadikan lebih berkualitas (Rachmanti dkk, 2019).

UMKM di Indonesia belum semuanya mempraktikkan akuntansi dipencatatan keuangannya, masih banyak dari mereka yang menghadapi kendala didalam penyusunan laporan keuangan. SAK sendiri mungkin lebih rumit untuk dipahami bahkan diterapkan bagi skala usaha kecil menengah, sehingga perlu adanya penerapan SAK EMKM dalam pencatatan laporan keuangan. UMKM sedikit dipermudah dengan adanya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh IAI yang dimana SAK EMKM efektif per 1 Januari 2018.

Standar Akuntansi Keuangan ini memiliki tiga jenis laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. SAK EMKM dapat membantu memudahkan pelaku UMKM dalam mengaplikasikan akuntansi pada usaha mereka sehingga dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar, meskipun SAK EMKM terkesan sederhana namun dapat memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Menyusun laporan keuangan yang sesuai standar terlebih dahulu harus ada pembenahan sistem dari dalam perusahaan itu sendiri, karena sistem yang bagus akan memudahkan dalam penerapan dan kenyataanya. Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan "*Exposure Draft SAK EMKM*" dalam rapatnya pada tanggal 18 mei 2016 dan berlaku efektif 1 januari 2018, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (Warsadi dkk, 2017).

Kriteria Usaha Mikro adalah Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00. Kriteria Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.

Kriteria Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a, serta ayat (3) huruf a, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Menurut Penelitian yang dilakukan Warsadi dkk, (2017) meneliti tentang penerapan penyusunan laporan keuangan pada usaha kecil menengah berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah pada PT. Mama Jaya menyimpulkan belum di terapkanya SAK EMKM, karena kurangnya pengetahuan pemilik PT. Mama Jaya tentang adanya Standar akuntansi dalam melakukan pencatatan keuangan yaitu SAK EMKM. Pendapat pemilik UMKM bahwa kegiatan pencatatan dilakukan hanya untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan serta perhitungan laba, serta tidak adanya sosialisasi yang memperkenalkan adanya SAK EMKM kepada para pemangku UMKM, sehinga

pemilik UMKM ada yang tidak mengenal tentang adanya SAK EMKM agar pihak UMKM bisa menerapkan pada usahanya.

Djuwito, (dkk 2017) meneliti tentang Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berdasarkan SAK EMKM di Surabaya. Hasil penelitian bahwa usaha jasa laundry mitra tidak melakukan pencatatan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku pada SAK EMKM, usaha jasa laundry mitra memiliki pencatatan keuangan hanya pada pemasukkan dan pengeluaran laundry, sehingga penerapan akuntansi berdasarkan pencatatan transaksi dan laporan keuangann yang berdasarkan SAK EMKM pada usaha jasa laundry masih sangat lemah.

Menurut penelitian yang dilakukan Putra (2018) meneliti tentang Pemetaan Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Tangerang Selatan menyimpulkan UMKM di Kota Tangerang Selatan belum melakukan penerapan SAK EMKM pada laporan keuangannya karena kendala yang di hadapi diantaranya usia pemilik ataupun pengelola UMKM, dan latar belakang pendidikan dari pemilik.

Amani (2018) meneliti tentang Penerapan SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM di UD Dua Putri Solehah Probolinggo berdasar hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan UD Dua Putri Solehah belum disusun sesuai SAK EMKM.

Penelitian yang dilakukan (Rachmanti dkk, 2019) meneliti tentang Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Batik Jumpat Dahlia Berdasarkan SAK EMKM, menyimpulkan tidak adanya laporan keuangan pada UMKM Batik

Jumput Dahlia belum mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku untuk EMKM. Hal ini dilihat dari bukti pencatatan yang dilakukan yakni hanya mencatat keluar masuknya kas, serta tidak mencatat seluruh aset yang dimiliki. Keadaan yang seperti ini mengakibatkan UMKM Batik Jumputan Dahlia tidak mampu mengetahui segala macam kegiatan yang bisa mempengaruhi berkurang dan bertambahnya nilai suatu aset yang dimiliki. Bukti-bukti transaksi yang terjadi selama periode tertentu tidak diarsipkan maupun dicatat keseluruhannya hal ini mengakibatkan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan.

Adapun objek penelitian yang ingin diteliti adalah UMKM Batiq Colet pengrajin kain jumputan Palembang yang bergerak dibidang usaha kain jumputan. Batiq Colet pengrajin kain jumputan Palembang belum melakukan penerapan Standar Akuntansi Keuangan pada laporan keuangannya dilihat dari segi kemampuan yang meliputi latar belakang pendidikan yang kurang memadai, belum pernah mengikuti pelatihan akuntansi, kebutuhan akuntansi masih kurang memadai dan dari segi pengelola belum ada kebutuhan terhadap penerapan akuntansi. Sehingga pengelolah hanya mencatat laporan kas masuk saja, karena belum sesuai dengan SAK EMKM dari latar belakang diatas, Maka penulis dapat mengambil artikel dengan judul analisis penerapan SAK EMKM pada batik colet pengrajin kain jumputan Palembang.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis penerapan SAK EMKM pada batiq colet pengrajin kain jumputan Palembang, Pada UMKM kain jumputan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Objek analisis pada penelitian ini difokuskan pada pemilik UMKM Kain Jumputan di Kota Palembang.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis penerapan SAK EMKM pada Batiq Colet pengrajin kain jumputan Palembang ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelian ini yaitu untuk analisis penerapan SAK EMKM pada Batiq Colet pengrajin kain jumputan Palembang.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi pembaca, mahasiswa dan pelajar diharapkan penelitian ini akan bermanfaat sebagai tambahan materi dan pengetahuan khususnya dalam

bidang akuntansi tentang penerapan standar akuntansi yang dalam penelitian ini adalah SAK EMKM ke dalam laporan keuangan.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi Batiq Colet dalam penelitian ini adalah menambah pengetahuan bagi pemilik Batiq Colet dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang dalam penelitian ini menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).